

UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TUBAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

Moh. Wazid Husni

(PPKn, FISH, UNESA) moh.husni@mhs.unesa.ac.id

Harmanto

(PPKn, FISH, UNESA) harmanto@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya KPU kabupaten Tuban dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada pemilu tahun 2019, tingkat partisipasi masyarakat terhadap politik naik. Angka golput semakin menurun, dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi politik di Negara semakin meningkat. Adanya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap politik karena upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijalankan di setiap wilayah. Seperti di Kabupaten Tuban, tercatat pada pemilu 2019 tingkat partisipasi masyarakat meningkat dalam pemilihan umum. Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pemilu dilandasi oleh upaya yang dilakukan oleh KPU kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara yang dilakukan secara online dan tatap muka dengan kelima informan yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban adalah sosialisasi politik, pendidikan politik bagi pemilih pemula serta pembentukan relawan demokrasi. Berdasarkan teori yang digunakan yaitu teori belajar politik behavior bahwa pendidikan politik dapat mempengaruhi sikap atau perilaku setiap individu dalam partisipasi politik. Sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa peningkatan partisipasi politik masyarakat Tuban dipengaruhi oleh beberapa kegiatan atau program-program yang diselenggarakan oleh KPU di kabupaten Tuban.

Kata Kunci: KPU, Partisipasi Politik, Pendidikan Politik.

Abstract

The aim of the research is to describe the efforts of the Tuban district general election commission in increasing public participation. In the 2019 elections, the level of public participation in politics increased. The number of abstentions is decreasing, and the public's concern for the political conditions in the country is increasing. There is an increase in public participation in politics due to the efforts made by the General Election Commission which is carried out in each region. As in Tuban district, it was noted that in the 2019 elections the level of public participation increased in the general election. The increase in public participation in the elections was based on the efforts made by the Tuban district election commission. This study used a qualitative method with a descriptive design. The data obtained were in the form of interviews conducted online and face to face with five informants who met the specified criteria. The data validity technique used was source triangulation. The results of the study explained that the efforts made by the Tuban district general election commission were political socialization, political education for first-time voters and the formation of democratic volunteers. Based on the theory used, namely the political behavior learning theory that political education can influence the attitude or behavior of each individual in political participation. According to the research results, it was found that the increase in political participation of the Tuban people was influenced by several activities or programs organized by the general election commission in the district.

Keywords: General election commission, Politic Participation, Politic education.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Pemilihan Umum merupakan sebuah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan secara efektif berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui pemilihan umum

memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Pemilihan umum merupakan langkah awal terbentuknya pemerintahan yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak, dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai warga negara.

Warga negara adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan warga negaralah yang bisa

menentukan nasib negara dan bangsa ke depan. Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Dimana dalam pemilihan umum secara langsung rakyat dapat terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara dengan berpartisipasi langsung melakukan pemilihan umum. Hak yang dimiliki masyarakat ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum.

Mewujudkan pola kehidupan sistem kedaulatan warga negara yang demokratis tersebut adalah melalui pemilihan umum. Dengan pemilihan umum tersebut, warga negara Indonesia ingin turut serta secara aktif untuk berpartisipasi dalam memilih wakil mereka dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah karena partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Sastroatmodjo (1995:67) menyatakan negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan warga negara dalam kerangka demokrasi Pancasila.

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan warga negara, karena pada saat pemilu itulah, warga negara menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik disuatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Partisipasi politik tentu berhubungan erat dengan demokrasi, dimana partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi dari masyarakat selaku penentu jalannya suatu pemerintahan. Dalam pelaksanaan pemilu partisipasi politik tentu berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang dinyatakan terpilih. Setiap elemen masyarakat tentu memiliki standar maupun selera masing masing untuk menentukan pilihan dalam pemilu. Tidak hanya hal itu, tetapi partisipasi masyarakat dalam pemilu mempunyai peran besar dan dapat dipandang sebagai control masyarakat terhadap pemerintahan. Tidak hanya sebagai inti dari demokrasi ,

partisipasi juga berhubungan erat dengan pemenuhan hak politik warga dalam suatu negara.

Kegiatan warga negara biasa dibagi dua mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Pengalaman pemilihan umum yang berlangsung dalam beberapa dekade menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya. Seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan warga negara dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum secara langsung oleh warga negara merupakan sarana perwujudan kedaulatan warga negara guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Warga negara merupakan objek dalam kegiatan politik, pemilih pemula yang menjadi objek dalam kegiatan politik masih memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke depan dapat berperan dalam bidang politik. Mereka sebagai pengambil keputusan perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik termasuk kegiatan pemilihan umum agar mereka jangan sampai tidak ikut berpartisipasi politik (golput) pada pelaksanaan pemilihan umum. Golput merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pembangunan dan kelangsungan bangsa dan negara. Dengan demikian meskipun hanya warga negara, tetapi partisipasi mereka ikut menentukan arah kebijakan di Indonesia ke depan.

Pembinaan atau ajakan menarik dilakukan oleh kabupaten Tuban di setiap TPS pada setiap pemilihan selalu memberikan *doorprize* yang salah satunya berupa

kambing agar masyarakat mau memberikan hak pilihnya. Alasan diadakannya *doorprize* itu karena keikutsertaan pemilih rendah untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan umum sebelumnya (2014). Sehingga diharapkan pada pemilihan umum tahun 2019 lebih banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya. Biaya untuk pengadaan *doorprize* ini bukan berasal dari anggaran Pemilihan umum, melainkan swadaya dari PPS, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). (Kumparan 28 Januari 2019 diakses pada tanggal 1 September 2019)

Sejarah penyelenggaraan pemilihan presiden di Indonesia menunjukkan fakta terjadinya peningkatan pada tahun 2019 setelah diadakan *doorprize*:

Tabel 1
Data Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan
Presiden tahun 2009-2019

No	Tahun	Memberikan suara	Tidak memberikan suara
1.	2009	621.935	267.376
2.	2014	641.097	270.888
3.	2019	769.473	177.275

Sumber: KPU Tuban, 2009-2019

Dari tabel 1.1 bisa diketahui bahwa dari tahun 2009-2014 menunjukkan bahwa partisipasi dari warga negara semakin menurun setiap tahun pemilihan dikarenakan semakin besar yang tidak memberikan suara pada tahun 2014. Namun pada tahun 2019 pemilihan umum di Kabupaten Tuban semakin meningkat dikarenakan partisipasi dari warga negara yang tidak memberikan suara semakin sedikit. Dari keadaan tersebut akan menarik untuk meneliti bagaimana upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara di Kabupaten Tuban.

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti "mengambil bagian". Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103).

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan

politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (dalam Cholisin, 2007:151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Kegiatan yang mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya. Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin (2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Menurut Miriam Budiardjo, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*).

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Budiardjo, 2008: 369).

Perilaku Politik (*Political Behavior*) menurut Sitepu (2012:88) perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dan yang melakukan kegiatan politik tersebut adalah pemerintah dan masyarakat. Perilaku politik dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok yakni: pertama, perilaku politik lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah; kedua, perilaku politik warga negara biasa (baik sebagai individu maupun kelompok). Suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan wewenang) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan (sedangkan fungsi itu sendiri merupakan upaya mencapai tujuan masyarakat, negara atau nilai-nilai politik), tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan dan dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu) individu yang membuat keputusan tersebut (Surbakti, 1992:131).

METODE

Berdasarkan tujuan pada penelitian ini yaitu mendeskripsikan upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara di Kabupaten Tuban maka pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Sukmadinata (2005: 60) menyatakan bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu mau pun kelompok.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata mau pun gambar, bukan dengan angka-angka. Dengan demikian penelitian akan berisikan kutipan data guna untuk memberikan gambaran terhadap penyajian data. Dalam artian data yang disajikan berbentuk kata-kata hasil dari wawancara. Sehingga penggunaan pendekatan penelitian kualitatif pada penelitian ini dengan mencocokkan antara fakta atau realitas empirik dengan teori yang berlaku didukung dengan penggunaan metode deskriptif.

Adapun jenis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggali data dan informasi tentang topik yang ditujukan untuk kepentingan pendalaman. Alasan pemilihan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif adalah untuk mendeskripsikan dengan cara menggali mengenai upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara di Kabupaten Tuban.

Pada dasarnya, masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Fokus ini berfungsi untuk membatasi suatu permasalahan. Tanpa adanya fokus, suatu penelitian akan terjebak dengan banyaknya data yang diperoleh di lapangan sehingga fokus ini dibutuhkan untuk mengarahkan penelitian. Menurut Moleong (2004:237) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang baik.

Pada penelitian ini, memfokuskan penelitian pada upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara di Kabupaten Tuban. Penelitian dilakukan pada lima informan yang memenuhi kriteria dari peneliti. Informan adalah anggota dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban. Pada penelitian ini, pengambilan sumber data atau informan penelitian menggunakan teknik "*purposive sampling*". Sukmadinata (2005: 101) menyatakan bahwa sampel *purposive* adalah sampel yang

dipilih karena memang menjadi sumber dan kaya dengan informasi tentang fenomena yang ingin diteliti. Pengambilan sampel ini didasarkan pada pilihan tentang aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu sehingga sampling bersifat *purposive* yaitu tergantung pada tujuan fokus tertentu. Karena penelitian ini memfokuskan upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara di Kabupaten Tuban maka informan dalam penelitian ini adalah Relawan Demokrasi, Divisi KPU Bagian Partisipasi.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin yaitu cara mengajukan pertanyaan yang dikemukakan bebas, artinya pertanyaan tidak terpaku pada pedoman wawancara tentang masalah-masalah pokok dalam penelitian kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi di lapangan (Sutrisno Hadi, 1994: 207). Miles dan Huberman (Silalahi, 2010: 339) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur yang terjadi secara bersamaan.

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data merupakan suatu proses penyesuaian data antara data yang dilaporkan atau diinformasikan kepada peneliti dengan objek yang diteliti. Teknik keabsahan data ini dilakukan tidak lain untuk memperoleh data yang sah. Pada penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi data. Menurut Sugiyono (2008: 125) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, sehingga dalam hal ini, triangulasi itu sendiri terbagi menjadi tiga yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Menurut Sugiyono (2008: 127) data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dilihat bahwa upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara di kabupaten Tuban. Sebagai berikut.

Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan suatu proses interaksi manusia yang memberikan suatu pengaruh pada pengetahuan sistem politik, tanda-tanda politik, serta juga lembaga politik. Dengan adanya pengaruh itulah seseorang bisa atau dapat mengetahui dasar-dasar politik itu dengan benar.

Setiap partisipan atau pemilih di suatu Negara akan memilih individu dan komunitas yang cocok dalam

memimpin sebuah Negara. Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh komunitas agar dapat mendapatkan suara unggul dalam pemilihan di pesta demokrasi. Pesta demokrasi atau yang biasanya disebut PILKADA dan PEMILU di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 10 Tahun 2018 bahwa KPU memiliki peranan untuk menjalankan sosialisasi politik. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa penyelenggara pemilihan baik legislatif dan eksekutif merupakan tugas dari KPU Republik Indonesia.

KPU merupakan Komisi Penyelenggaraan Pemilu adalah lembaga penyelenggara pemilihan legislative dan eksekutif. Lembaga tersebut memiliki sifat tertutup, independent dan mandiri, sehingga KPU merupakan lembaga yang tidak terikat dengan politik maupun kelompok kepentingan lainnya. Selain lembaga tersebut, anggota-anggota dalam KPU juga harus terbebas dengan ikatan politik. Sosialisasi politik yang diselenggarakan oleh KPU merupakan suatu kegiatan yang memiliki proses penyampaian informasi tentang program-program dari calon kandidat legislatif dan eksekutif dalam pesta demokrasi, serta tahapan-tahapan dalam pesta demokrasi yang akan dilakukan. Sosialisasi ini merupakan bagian dari komunikasi antarpribadi yang bisa berlangsung secara langsung tanpa perantara, selain sosialisasi secara langsung KPU juga melakukan sosialisasi melalui media komunikasi seperti halnya surat kabar, radio, televisi yang sangat diperlukikan dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

KPU Tuban memiliki berbagai program untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat Tuban dalam pemilihan legislatif, eksekutif dan kepala daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Fatkul Iksan yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Tuban:

“salah satu program yang kita (KPU Tuban) jalankan agar dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat Tuban adalah adanya program sosialisasi terkait dengan pemilihan legislatif, eksekutif dan kepala daerah. Sasaran kita ya seluruh masyarakat, baik itu para pemilih pemula dan pemilih lanjut. Kegiatan atau program ini dirasa mampu meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat. Namun saat pandemi seperti ini kegiatan dialihkan dengan online, seperti adanya para masyarakat menyalurkan suaranya dalam pilkada Tuban saat ini. Semua itu kita rancang dengan baliho, foto dan video yang kami share melalui media sosial. Kalau tatap muka langsung biasanya langsung ke tempat-tempat ramai seperti pasar terus ke pihak perangkat desa untuk meminta izin kita sampaikan melalui acara desa. Seperti itu mas” (Wawancara, 15 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Fatkul Iksan yang merupakan ketua KPU Tuban bahwa

program sosialisasi politik yang dibuat adalah mengenai pembelajaran bersama kepada masyarakat umum agar dapat mengerti sistematika regulasi dalam pemilihan. Selain itu, program sosialisasi politik ini juga dilakukan pada tempat-tempat yang mencakup massa yang banyak.

Fatkul Iksan juga menambahkan pernyataannya sebagai berikut:

“sebenarnya selain itu, kita juga memberikan beberapa hadiah saat program sosialisasi politik ini dilakukan. Hadiah atau *doorprize* ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat mengikuti kegiatan atau program ini. Dan juga agar program ini dapat memberikan manfaat para warga baik pemilih awal dan pemilih lanjut bahwa politik itu mengasyikan dan suara mereka itu sangat berharga dalam keberlangsungan Negara kedepannya, maka dari itu kita mengoptimalkan masyarakat agar tidak golput” (15 Oktober 2020).

Menurut Fatkul Iksan, upaya yang dilakukan oleh KPU untuk dapat menggaet beberapa warga agar dapat mengikuti kegiatan sosialisasi politik adalah dengan cara pembagian hadiah. Karena dengan adanya upaya ini dapat menarik antusias para warga agar dapat menggunakan suara politiknya.

Upaya KPU dalam menjalankan program sosialisasi politik adalah dengan bertujuan meminimalisir serta mengurangi angka dari golput dari para warga yang terdapat di kabupaten Tuban. Terlebih lagi pada bulan Desember ini terdapat pemilihan kepala daerah, sehingga kegiatan-kegiatan dan program yang dijalankan oleh KPU ini hanya bisa dijalankan melalui media online.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kasmuri yang juga merupakan anggota KPU Tuban Devisi Hukum:

“Program yang dijalankan KPU Tuban adalah sosialisasi kepada masyarakat itu yang pertama. Dalam kegiatan sosialisasi politik ini bertujuan agar masyarakat paham, siapa yang dipilih mereka memiliki visi-misi apa dan bagaimana cara nyoblos. Ya penjelasan tentang tata cara dalam pemilihan. Selain itu juga kegiatan ini juga diisi dengan berbagai panggung kreasi dan adanya *doorprize* biar menarik perhatian masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini” (Wawancara, 17 Oktober 2020).

Bentuk sosialisasi politik bukan hanya pengenalan tentang bagaimana memilih kepala daerah, namun juga menghibur para warga. Nur Hakim anggota KPU Tuban Devisi Teknis Penyelenggaraan juga memaparkan hal yang sama, berikut uraiannya:

“Untuk upaya yang kita lakukan saat ini agar dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat Tuban ya pertama sosialisasi politik ini mas. Karena program ini merupakan program yang mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat Tuban” (Wawancara, 17 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas, maka dapat dilihat bahwa program yang dijalankan oleh KPU Tuban adalah sosialisasi politik. Program ini merupakan pemberian pemahaman memberikan hak politik individu dari KPU kepada masyarakat sekitar dengan cara gebyar panggung seni dan kegiatan bagi-bagi hadiah.

Fungsi dan Manfaat Sosialisasi Politik. Tiap-tiap individu tentu saja mustahil apabila tidak menginginkan kekuasaan, baik itu di dalam kelompok, negara, serta keluarganya. Dengan melalui padangan terhadap kondisi tersebut fungsi mempelajari sosialisasi politik ini adalah dengan memberikan asupan secara langsung terhadap bagaimana cara mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, manfaat dari sosialisasi politik ialah memelihara sistem politik yang terdapat di wilayah serta negara. Pemeliharaan tersebut sifatnya adalah kesinambungan antar generasi satu ke generasi yang lain. Dalam mencapai kondisi tersebut akhirnya tiap-tiap orang penting itu mempelajari sosialisasi politik.

Makna sosialisasi politik adalah suatu proses hasil belajar dari pengalaman yang ada. Memberikan indikasi umum mengenai hasil belajar tingkah laku individu serta kelompok di dalam batas-batas yang luas serta lebih khusus yang berkenaan dengan pengetahuan atau juga informasi, nilai sertasi kap. Sosialisasi ini tidak dibatasi usia. Sosialisasi ini adalah suatu prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial. Sosialisasi politik ini bisa atau dapat dilakukan di berbagai lingkungan, seperti pada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kehidupan bernegara atau juga di dalam lingkungan partai politik.

Tujuan dari sosialisasi politik adalah untuk dapat atau bisa memperluas pemahaman serta penghayatan dan juga wawasan terhadap suatu masalah-masalah politik yang berkembang. Mampu untuk meningkatkan kualitas diri di dalam berpolitik itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Proses sosialisasi ini menjadikan seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam melakukan peran politiknya. Selain itu, seseorang juga bisa mengerti tentang norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Lewat proses sosialisasi seseorang juga bisa belajar tentang hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain. Dengan begitu, bisa mendapatkan ilmu luas yang berkaitan dengan gejala politik dan masalah masalah politik yang terjadi dalam masyarakat.

Dapat meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat itu menuju peran aktif serta partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa itu secara keseluruhan.

Pada wawancara yang dilakukan dengan para anggota KPU di kabupaten Tuban ternyata memang pada Pemilu

2014 terdapat hasil partisipasi politik masyarakat yang tidak begitu memuaskan. Seperti yang diungkapkan oleh Fatkul Iksan sebagai berikut:

“Kalau tingkat golput dari pemilu 2019 itu perbandingannya dengan pemilihan sebelumnya, yaitu di pilkada 2016, di 2016 itu hanya 52% (tingkat partisipasinya). Sedangkan di pemilu 2019 itu agak relative tinggi (naik). Kenaikan di pemilu 2019 82% (sangat tinggi untuk kenaikan di bandingkan 2016), karena pemilihannya juga berbeda. Untuk pemilihan 2014 pilihan bupati, yg 2019 pemilihan presiden, DPD dan DPR. Sangat signifikan kenaikannya terkait dengan partisipasi pemilih” (Wawancara, 15 Oktober 2020).

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Warga negara adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan warga negaralah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa kedepan.

Meningkatnya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dari tahun 2009-2014 menunjukkan bahwa partisipasi dari warga negara semakin menurun setiap tahun pemilihan. Namun, pada tahun 2019 ajakan menarik dilakukan oleh Kabupaten Tuban di setiap TPS pada setiap pemilihan selalu memberikan *doorprize* yang salah satunya berupa kambing agar masyarakat mau memberikan hak pilihnya ternyata berhasil meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Tuban.

Alasan diadakannya *doorprize* itu karena keikutsertaan pemilih rendah untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan umum sebelumnya. Kebiasaan atau kegiatan ini selalu dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban setiap kali menjalankan pemilihan kepala daerah baik bupati, gubernur, legislatif dan presiden. Hasilnya dan manfaatnya seperti dalam hasil penelitian menunjukkan bahwasanya partisipasi mereka meningkat. Banyak yang mengikuti kegiatan politik seperti kampanye dan mencoblos.

Hal serupa juga disampaikan oleh Nur Rokhib yang merupakan anggota KPU kabupaten Tuban Devisi Perencanaan dan Data:

“Dari tahun ke tahun itu data ada perbedaan tentunya, karena perkembangan jumlah penduduk sehingga dari tahun ke tahun kenaikan data pemilih itu sekitar 2% maksimal. Kalau kemarin di PEMILU 2019 939.865 saat ini ada kenaikan 1,5%, sebanyak 949 sekian (kenaikan jumlah pemilih). Untuk meningkatkan partisipasi itu ya dengan beberapa kegiatan mas. Salah satu program adalah program sosialisasi terkait dengan pemilihan pemula. Bagaimana pemilih pemula itu mempunyai hak pilih dan bisa menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin yang akan datang. Ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya

tatap muka sebelum ada pandemic itu ada kegiatan tatap muka ke tempat2 keramaian, keg or, ke rest area, ke pasar. Tapi saat pandemic hari ini kegiatan itu berkurang dan dialihkan ke kegiatan2 yang sifatnya online. Sehingga kegiatan yang sifatnya tatap muka itu berkurang, tapi tetap upaya untuk peningkatan partisipasi, upaya untuk penyadaran masyarakat betapa pentingnya demokrasi itu tetap dilakukan oleh KPU Tuban” (Wawancara, 15 Oktober 2020).

Kegiatan dan program yang dijalankan oleh KPU kabupaten Tuban memiliki kendala pada masa pandemi sekarang. Namun ada beberapa upaya yang dilakukan agar program-program sosialisasi politik serta program lainnya masih dapat berjalan dan menarik partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislative, eksekutif dan kepala daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Nur Rokhib di bawah ini:

“Salah satu program adalah program sosialisasi terkait dengan pemilihan pemula. Bagaimana pemilih pemula itu mempunyai hak pilih dan bisa menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin yang akan datang. Ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya tatap muka sebelum ada pandemic itu ada kegiatan tatap muka ke tempat-tempat keramaian, seperti ke Gedung Olahraga, ke *rest area*, ke pasar. Tapi saat pandemi hari ini kegiatan itu berkurang dan dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya online sehingga kegiatan yang sifatnya tatap muka itu berkurang, tapi tetap upaya untuk peningkatan partisipasi, upaya untuk penyadaran masyarakat betapa pentingnya demokrasi itu tetap dilakukan oleh KPU Tuban. Kegiatan selama tatap muka itu Contoh : datang ke pasar terus disitu KPU Kab Tuban membuat kegiatan sedikit perlombaan disampaikan kepada orang-orang yang ada di pasar itu dan didalamnya dikasih materi terkait dengan kepemiluan. Termasuk sosialisasi terkait dengan tatap muka. Mengundang organisasi-organisasi ekstra ada PMII, GMNI, HMI itu juga diundang. Diundang tatap muka dan juga diberikan materi terkait dengan kepemiluan. Kalau hadiah tidak ada, Cuma dikasih cinderamata dari KPU Tuban. Berupa mug, payung, pin, gantungan kunci. Tujuannya untuk mensosialisasikan terkait dengan KPU Kab Tuban” (Wawancara, 15 Oktober 2020).

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah

dan pelaksanaan pemerintahnya. Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi.

Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah

Sementara itu menurut Milbrath yang dikutip oleh Michael Rush dan Althof (1989:168) memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu: Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Kedua, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama).

Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik. Ketiga, yaitu menyangkut sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik. Keempat, yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan upaya dari program sosialisasi politik yang dibuat oleh KPU kabupaten Tuban membuahkan hasil. Selain pernyataan dari ketua KPU Babupaten Tuban. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Zakiyatul yang merupakan salah satu anggota KPU Tuban Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.

“Program-program yang kita janjikan salah satunya adalah sosialisasi politik ini memiliki dampak atau pengaruh yang baik. Salah satu dampak atau pengaruh yang baik meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Yang awalnya melihat pesta demokrasi itu tidak penting mereka jadi melihat bahwa ini adalah fenomena yang penting bagi mereka dan mereka harus ikut berpartisipasi. Lah itu salah satu contoh agar dapat

meminimalisir masyarakat kabupaten Tuban. Tapi memang ternyata angka golput di Tuban menurun semenjak tahun 2019 itu. Banyak yang ga golput, semua meningkat partisipasi politiknya. Ini memang tujuan yang diharapkan ya mas” (Wawancara, 25 Oktober 2020).

Penuturan di atas dilanjutkan dengan ungkapan yang disampaikan oleh Nur Rokhib di bawah ini:

”Memang untuk tujuan adanya program seperti sosialisasi politik adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan di saat pesta demokrasi baik legislative, eksekutif dan kepala daerah. Karena ya dengan itu kita sangat berupaya sekali untuk mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik” (Wawancara, 15 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dari Zakiyatul dan Nu Rokhib dapat dilihat bahwa peningkatan partisipasi politik adalah tujuan utama dibuatnya program sosialisasi politik. Dengan adanya perilaku politik ini, masyarakat lebih mengenal dan memahami etika, moral, dan nilai-nilai politik pemerintah, yang kemudian akan mempengaruhi partisipasi politiknya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pada pemilu 2019 partisipasi masyarakat dalam politik naik. Pertama, faktor kandidat yang mungkin lebih menarik dan berkampanye dengan atraktif. Kedua, faktor pemilih yang merasa terwakili, baik secara politik atau programatik. Ketiga, ada faktor kontestasi yang ketat. Keempat, faktor gencarnya pemberitaan media mengenai Pemilu 2019.

Namun selain mendapatkan peningkatan partisipasi dalam politik, KPU seharusnya masih melanjutkan program-program yang mampu meningkatkan perdamaian pasca kondisi pemilihan. Karena ketika partisipasi politik meningkat, maka tingkat perdebatan masyarakat terhadap politik juga meningkat. Dengan adanya fenomena tersebut, maka seharusnya KPU tetap menjalankan tugasnya untuk mengontrol kondisi politik di daerah dan Negara.

Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula

Menggunakan hak suara atau hak pilih dalam pesta demokrasi merupakan salah satu cara cerdas yang dilakukan warga Negara untuk memajukan Negaranya. Selain menggunakan suaranya dan hak pilih dalam pesta demokrasi, mengikuti berita-berita politik, menyuarakan pendapat dan kritiknya dalam pembangunan Negara melalui media sosial, dan gabung pada komunitas serta ormas politik adalah bagian-bagian partisipasi politik lainnya yang diharapkan. Partisipasi politik tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik yang masih menjadi pemilih pemula maupun pemilih lanjut. Semua tidak terpatok dengan umur.

Partisipasi politik merupakan salah satu gerakan yang dapat dipelopori oleh semua kalangan. Baik itu muda

maupun tua, memiliki status sosial tinggi maupun rendah dan pendidikan tinggi maupun rendah. Namun, gerakan ini dapat dijalankan oleh semua kalangan. Ada banyak keuntungan agar dapat menjalankan visi-misi dan tujuan Negara tercapai dengan baik. Langkah yang tepat agar partisipasi politik masyarakat dapat naik adalah dengan cara mengajarkan pendidikan politik bagi masyarakat (pemilih pemula dan pemilih lanjut).

Dalam pengembangan pendidikan politik, di Indonesia sendiri sudah dikenalkan di bangku sekolah. Contohnya adalah dengan memasukan pendidikan politik pada kurikulum pendidikan. Selain itu, menerapkan budaya sekolah dengan menjalankan latihan pesta demokrasi. Seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas serta pemilihan struktur kelas. Sikap demokratis di kalangan siswa dapat ditumbuhkembangkan di lingkungan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat maupun sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Sikap demokratis yang akhirnya tertanam sejak dini akan memberikan pengaruh kepada siswa dalam kehidupan di masa mendatang pasca siswa tersebut telah memiliki hak politik sebagai warga negara. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan pembelajaran yang dialami oleh siswa agar nanti mengetahui bagaimana jalannya pesta demokrasi di Indonesia.

Untuk pemilih pemula, memang Negara sudah melakukan berbagai upaya agar generasi muda mengenal politik. Namun, bagaimana dengan beberapa individu yang tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan. Bagaimana upaya KPU dan pemerintah agar dapat memutus rantai partisipasi rendah masyarakat. Dalam wawancara yang dilakukan salah satu upaya KPU Tuban dalam meningkatkan partisipasi politik warganya adalah dengan cara pendidikan politik di masyarakat.

Berdasarkan uraian dari Kasmuri, pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

”kalau di sini salah satu bentuk pendidikan politik kepada pemilih pemula adalah dengan memberikan ajaran langkah pertama apa yang harus disiapkan dan bagaimana untuk memilih” (Wawancara, 17 Oktober 2020).

Pernyataan dari Kasmuri dilanjutkan oleh Nur Hakim sebagai berikut:

”Pada pendidikan politik, kelompok muda yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu disebut dengan Pemilih Pemula. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih yaitu: 17 (tujuh belas) tahun, sudah/pernah menikah, purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/kepolisian yang dibuktikan dengan SK pensiun dari pejabat TNI/polri yang berwenang memberikannya, Berdomisili di daerah pemilihan (dapil) sekurang-kurangnya enam bulan sebelum

disahkannya daftar pemilih sementara (DPS) yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP). Untuk kegiatannya sosialisasi. Lah berhubung mereka ini pemula jadi pengenalan politiknya seperti tata cara mencoblos pada hari H dan bagaimana agar bisa menjadi penengah dalam keadaan politik saat ini. Penengah maksudnya ikut menertibkan bukan malah menambahkan kekacauan dan juga. Selain itu juga kita memberikan pengajaran bahwa partisipasi mereka dalam politik ini diperlukan karena kan juga untuk pembangunan negara” (Wawancara, 17 Oktober 2020).

Pemahaman kesadaran politik bagi pemilih pemula membutuhkan berbagai penanaman atau aktualisasi dengan pembelajaran yang melibatkan mereka secara langsung. Alasan kenapa mereka dilibatkan adalah individu yang memiliki potensi untuk mendobrak suara legislative, eksekutif dan kepala daerah. Selain itu, mereka juga mampu untuk mengembangkan pikiran kritisnya dalam melihat kondisi para calon.

Pendidikan politik bagi pemilih pemula merupakan kegiatan yang harus dilakukan atau diadakan. Karena kegiatan ini merupakan salah satu cara bagi pemilih pemula untuk dapat menentukan suara mereka atau hak dalam menentukan pilihan terbaik dalam pemilu. Selain itu pendidikan politik juga memiliki upaya untuk meningkatkan kesadaran berpolitik dan memberikan pengetahuan yang memadai kepada pemilih pemula, sehingga mereka dapat memberikan keputusan dalam memilih calon yang sesuai dengan kriterianya secara rasional. Tanpa ada *factor money politic*.

Dalam hal seseorang belum memiliki KTP, maka ia dapat menggunakan tanda identitas kependudukan atau surat keterangan bukti domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah pemilih pemula yang sangat besar mempunyai nilai strategis dalam menentukan kemenangan partai politik atau kandidat tertentu yang berkompetisi dalam pemilihan umum. Itulah sebabnya, dalam setiap pemilu, pemilih pemula menjadi rebutan berbagai kekuatan politik.

Dibalik potensinya tersebut, pemilih pemula dihadapkan pada minimnya pengetahuan, wawasan dan pengalaman berpolitik. Karena belum punya pengalaman memilih dalam pemilu, pada umumnya banyak dari kalangan mereka yang belum mengetahui berbagai hal yang terkait dengan pemilihan umum.

Seperti yang diungkapkan oleh Nur Hakim bahwa pendidikan politik bagi pemilih pemula hal yang sangat dibutuhkan. Hal yang setara juga dingkapkan oleh Fatkul Iksan di bawah ini:

“Mereka kurang menyadari bahwa suaranya sangat berarti bagi proses politik di negaranya. Bahkan tidak jarang mereka enggan berpartisipasi dalam pemilu dan memilih tidak menggunakan hak

pilihnya alias golongan putih (golput). Berdasarkan uraian di atas, kita dihadapkan pada permasalahan. Bagaimana pendidikan politik yang dapat menumbuhkan kesadaran politik pemilih pemula? Melalui pendidikan politik, diharapkan pemilih pemula dapat menjadi pemilih yang cerdas yang dengan sadar menggunakan hak pilihnya dan dapat memilih pemimpin yang berkualitas demi perbaikan masa depan bangsa dan negara” (Wawancara, 17 Oktober 2020).

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan, dijelaskan bahwa program yang dilakukan oleh KPU Tuban adalah memberikan pemahaman keaktifan politik masyarakat. Tujuannya agar tidak menggunakan hak politiknya dalam bentuk yang salah. Penjelasan lebih detail tentang program yang digerakan oleh KPU tuban disampaikan sebagai berikut:

“Ada beberapa hal yang perlu diketahui khususnya oleh pemilih pemula Visi, misi, dan program partai sangat berkaitan erat dengan visi, misi, dan program calon, sehingga antara visi, misi, dan program partai dengan visi, misi, dan program calon harus dicermati secara komprehensif dan menjadi fokus utama yang perlu dicermati. Visi merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi sebuah partai politik dan calon. Hal ini disebabkan visi mengandung nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan partai politik dan calon di masa depan. Para pemilih dan masyarakat dapat mengetahui visi partai politik dengan mencermati Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai.” (Wawancara, 17 Oktober 2020).

AD/ART partai politik adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap. Disebut juga sebagai konstitusi partai. Selain mengetahui visi, misi dan AD/ART tiap partai dengan adanya program-program dari KPU kabupaten Tuban, masyarakat juga dapat mengenal calon kepala daerah lebih detail lagi. Seperti yang disampaikan di bawah ini:

“Sedangkan visi calon dapat dicermati melalui kampanye maupun pertemuan atau rapat yang telah ditentukan. Misi biasanya mengarahkan partai politik dan calon menuju suatu tujuan yang dapat dijabarkan ke dalam program-program. Misi menempati posisi strategis, karena secara filosofis harus mampu menerjemahkan visi dan secara teknis harus mampu diimplementasikan ke dalam program. Biasanya partai politik dan calon mengemas program tersebut sebagus mungkin, sehingga program-program mereka terlihat sempurna dan menjanjikan masa depan yang lebih baik kepada para pemilih dan masyarakat” (Wawancara, 17 Oktober 2020).

Menurut Fatkul Iksan, salah satu upaya agar para pemilih pemula merasa tertarik untuk menyalurkan suara

politiknya adalah dengan cara memberikan visi-misi dari setiap pasangan calon yang bertarung di kontestasi politik. Pemahaman terhadap visi-misi yang diberikan oleh calon akan menimbulkan sikap selektif dari setiap individu untuk dapat menentukan pilihannya. Dari visi misi yang disampaikan setiap pasangan calon juga bisa disimpulkan terkait target pasangan calon kedepannya dan sasaran terhadap masyarakat.

Pembahasan politis harusnya mencakup terhadap pengembangan partisipasi politik di suatu Negara. Bukan hanya tentang kerangka hitungan suara melainkan mengacu pada mencerdaskan generasi muda terhadap fenomena politik yang lagi *on-going* di Indonesia. *Output* dari program pendidikan politik bagi pemilih pemula adalah menumbuhkan kesadaran politik sejak dini. Pemilih pemula merupakan actor politik, sehingga dengan adanya pendidikan politik menjadikan mereka menjalankan peran tersebut dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Peran sebaik mungkin tersebut adalah mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

Kesalahan dalam menilai program-program akan menimbulkan kesalahan dalam menentukan pilihan yang akan mengakibatkan terpilihnya orang-orang yang tidak tepat untuk mengemban tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan. Sebelum menentukan pilihan, sebaiknya pemilih mengenal dan mengetahui riwayat hidup calon dan partai politiknya. Pengenalan riwayat hidup calon tersebut, dapat berhubungan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktifitas dalam masyarakat, dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat. Sedangkan riwayat partai politik dapat berhubungan dengan sejarah pendirian, kepengurusan, dan rekam jejak di pemilu sebelumnya (apabila bukan partai baru). Melalui pengenalan riwayat hidup, pemilih dapat menimbang baik buruknya calon dan partai politik tersebut.

Setelah para pemilih pemula memiliki informasi yang cukup mengenai visi, misi, dan program partai politik dan calon, serta memperoleh data mengenai riwayat hidupnya, para pemilih dapat mendiskusikan informasi dan data itu dengan elemen yang ada di masyarakat, sehingga informasi dan data itu dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemilih dalam menentukan pilihan. Pemilih harus memilih secara rasional, apakah calon yang akan dipilih itu benar-benar menawarkan program yang sesuai dengan kebutuhan pemilih, dan secara personal. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Zakiatul di bawah ini:

“Sebaiknya para pemilih pemula tau apakah calon merupakan sosok yang betul-betul dapat dipercaya untuk dapat merealisasikan program tersebut? Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum berangkat ke tempat pemungutan suara,

yaitu: 1) pastikan bahwa pemilih telah menerima surat pemberitahuan dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) satu hari sebelum hari pemungutan suara, apabila belum menerima surat pemberitahuan, harap hubungi petugas KPPS; 2) datang ke tempat pemungutan suara di hari pemungutan suara pada waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; 3) membawa surat pemberitahuan yang sudah diterima dan membawa kartu pemilih (untuk pemilih kepala daerah dan wakil kepala daerah). Penanaman pendidikan politik perlu dilakukan dan sosialisasi pemilu sangat dibutuhkan guna memperbaiki kinerja para pemimpin dan kualitas bangsa Indonesia, karena kualitas suatu bangsa itu salah satu kriterianya adalah mempunyai wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan bersih dari tindak korupsi. Melalui pendidikan politik itu nanti yang diselenggarakan KPU, para pemilih pemula akan mengetahui semuanya” (Wawancara, 18 Oktober 2020).

Pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi kemudian. Sedangkan budaya politik adalah keseluruhan nilai, keyakinan empirik, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi di tempat kegiatan politik terselenggara.

Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga siswa diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.

Pendidikan politik mengupayakan penghayatan siswa terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup bermasyarakat termasuk hidup kenegaraan serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing.

Dalam hal ini bertujuan agar siswa berkembang menjadi warga negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut. Pendidikan dalam sistem yang demokratis menempatkan pendidikan politik pada posisi yang sangat sentral, karena untuk mendidik warga negara tentang kebajikan dan tanggung jawab sebagai anggota *civil society*.

Pendidikan tersebut berlaku sepanjang usia seseorang untuk mengembangkan diri, dan bukan hanya dilakukan pada lingkungan pendidikan formal seperti sekolah tetapi juga meliputi juga keluarga dan lingkungan sosial. Lembaga-lembaga pendidikan harus mencerminkan

proses untuk mendidik warga negara ke arah suatu masyarakat sipil yang kondusif bagi berlangsungnya demokrasi dan sebaliknya harus dihindarkan sejauh mungkin dari unsur-unsur yang memungkinkan tumbuhnya hambatan-hambatan demokrasi.

Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga siswa diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.

Program pendidikan politik bagi pemilih pemula mengupayakan penghayatan siswa terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup bermasyarakat termasuk hidup kenegaraan serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam hal ini bertujuan agar siswa berkembang menjadi warga negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut.

Pembentukan Relawan Demokrasi

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya.

Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Program relawan demokrasi dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Seperti yang diungkapkan oleh Nur Rokib di bawah ini:

“pembentukan relawan demokrasi ya tujuannya untuk membantu pihak KPU untuk menjalankan program sosialisasi, pendidikan bagi pemilih pemula serta proses pemilihan berlangsung. Dan awal muasal terbentuknya relawan demokrasi ya karena pemilu dulu tingkat pilihannya sedikit. Tiga pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pilukada di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada pemilu nasional misalnya, yaitu pemilu 1999 (92%), pemilu 2004(84%) dan pemilu 2009 (71%) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2014. Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah jenuh dengan

frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya” (Wawancara, 16 Oktober 2020).

Menurut pendapat dari Nur Rokib tersebut maka relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2014 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

Menurut Fatkul Iksan, adanya relawan demokrasi merupakan satu bentuk keterbantuan KPU dalam menjalankan tugas. Berikut pernyataannya:

“ tujuan dibentuknya program relawan demokrasi adalah dapat meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi. Lalu agenda kegiatan relawan demokrasi adalah memetakan varian kelompok sasaran (mapping), mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran, identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan, menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain, melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal, menyusun dan melaporkan kegiatan kepada kpu kab/kota” (wawancara, 15 Oktober 2020)

Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentutetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari.

Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (voluntarisme) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tuna ide dari kontestan pemilu. Pemilu 2014 mesti menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih yang sebelumnya ada. Angka partisipasi memilih harus meningkat dan inflasi kualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya memilih adalah tindakan politik yang mulia. KPU bersama komponen bangsa lainnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik itu terwujud. Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari lima segmen

pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosialpolitik berbangsa dan bernegara. Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembahasan

Dalam negara demokratis seperti Indonesia, pendidikan politik memiliki tempat atau komponen utama dalam negara untuk dapat memberikan pengetahuan tentang politik pada posisi yang sentral. Pendidikan politik memiliki tujuan atau manfaat untuk menciptakan warga Negara yang berkarakter dan menjunjung nilai-nilai moral yang berlaku. Dengan adanya pendidikan politik tersebut, maka warga Negara dapat memahami fenomena politik yang terjadi di Masyarakat. Hal ini berarti bahwa pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang semakin mengalami perkembangan dan semakin kompleksnya permasalahan politik.

Golongan yang dilibatkan dalam proses pendidikan politik tidak hanya golongan tua dan muda melainkan semua golongan yang terdapat dalam masyarakat. Keluarga juga menjadi tokoh yang penting dalam proses pendidikan politik, karena keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk bersosialisasi. Keluarga menjadi sarana paling strategis terutama dalam pembentukan kepribadian dasar dan sikap sosial bagi sang anak yang akan berpengaruh dalam orientasi politik.

Kajian terhadap perilaku politik lebih lanjut Sitepu (2012:89) menjelaskan bahwa dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis yaitu, individu sebagai aktor politik, agregasi politik dan tipologi kepribadian politik. Adapun di dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warganegara biasa. Perilaku Pemilih Perilaku adalah menyangkut sikap manusia yang akan bertindak sesuatu. Oleh karena itu sangat masuk akal tampaknya apabila sikap ini ditafsirkan dari bentuk perilaku. Dengan kata lain, untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu, kita dapat memperhatikan perilakunya, sebab perilaku merupakan salah satu indikator sikap individu (Bawono, 2008). Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang

menjadikan tujuan utama para kontestan untuk mereka mempengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Perilaku dalam hal ini dapat berupa komitmen maupun masyarakat pada umumnya. Konsisten adalah kelompok masyarakat yang merasa oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti politik dan seorang pemimpin (Firmanzah, 2007). Perilaku pemilih juga sarat dengan ideology antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideology yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan pengelompokan antara ideologiyang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi sama dibawa dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka (Nasution, 2009).

Menurut Nursal (2004:54) Ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih. Adapun pendekatan-pendekatan perilaku pemilih antara lain: Pendekatan Sosiologis Pendekatan teori dengan berdasarkan perspektif sosiologis, adalah pendekatan yang bersal dari Eropa dan di Amerika Serikat aliran pemikiran (School of thought) ini sangat populer dikalangan sosiologis dan ilmu politik yang berlatar belakang pemikiran Eropa. Menurut mazhab Columbia, pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal, dan lainnya memberi pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih.

Pendekatan Psikologis Konsep psikologi sosial yang dipergunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk kepada persepsi pemilih atau partai-partai politik yang ada atau adanya korelasi atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai-partai politik tertentu. Konkritnya, partai-partai politik yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lainnya.

Efektivitas peran representasi partai politik ditentukan oleh ada atau tidaknya mekanisme internal yang mampu mempertahankan hubungan dengan pemilih, dan peran wakil rakyat dari partai-partai politik tersebut. Dalam hal mekanisme internal, partai politik tidak memiliki peran berarti karena umumnya partai tidak menerapkan mekanisme khusus yang mengatur kewajiban anggotanya menggali aspirasi rakyat. Mekanisme yang biasanya dipakai hanyalah melalui pertemuan-pertemuan partai

yang sifatnya regular, mulai dari musyawarah cabang hingga musyawarah nasional

Pendekatan Rasional Alasan pilihan rasional berupa perhitungan untung rugi. Pendekatan ini melihat bahwa kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah tidak hanya ongkos memilih akan tetapi kemungkinan suaranya itu dapat memberikan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan dan juga sebagai alternatif berupa pilihan yang ada. Perhitungan untung dan rugi secara pribadi jikalau seseorang memilih sebuah partai politik tertentu.

Pendekatan Marketing Newman & Shet (1985) mengembangkan model perilaku pemilih berdasarkan beberapa domain yang terkait dengan marketing. Dalam mengembangkan model tersebut, mereka menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, komunikasi dari mulut ke mulut, dan media massa. Model ini dikembangkan untuk menerangkan dan memprediksi perilaku pemilih.

Pemilih pemula merupakan unsure yang sangat cocok dalam kehidupan berdemokrasi, karena mereka adalah kelompok yang memiliki massa yang paling banyak, selain itu mereka memiliki minim pengetahuan dan wawasan politik dalam pemilu. Sehingga dengan alasan tersebut, pemilih pemula sangat rentan dengan tindakan penyalahgunaan yang dipelopori oleh kelompok politik praktis lainnya atau kepentingan tertentu. Hal ini menjadi celah bagi kelompok yang memiliki kepentingan praktis yang berorientasi pada pragmatisme yang berbentuk gerakan *money politic*, dan politik identitas.

Politik uang, menurut (Ali Nurdin, 2014: 5) adalah istilah khas Indonesia yang tidak dikenal dalam literatur politik. Meski demikian, politik uang secara umum dipahami sebagai praktik pendistribusian uang (tunai atau dalam bentuk barang) dari individu kandidat pada Pemilu atau Pilkada kepada pemilih di wilayah pemilihan mereka. Istilah lain yang digunakan dalam literatur atau kajian politik adalah vote-buying atau pembelian suara oleh para kandidat Pemilu dengan membagi-bagikan uang atau bentuk konsesi lainnya. Praktek-praktek politik uang ini, baik vote-buying, vote-trading, ataupun pork barrel, membutuhkan dana besar dari kandidat-kandidat yang berkompetisi di Pemilu. Dalam hal ini, semua sumber daya disediakan sepenuhnya oleh kandidat yang bersangkutan tanpa ada kontribusi dari partai politik. Petahana dalam hal ini diuntungkan karena bisa mengakses sumber dana publik dalam kampanyenya. Namun untuk kandidat lainnya, kepemilikan sumber dana dalam jumlah besar merupakan sebuah keharusan.

Pemilihan umum dilaksanakan sebagai apresiasi masyarakat yang bisa menentukan sendiri siapa yang

layak menjabat sebagai kepala pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Pemilihan umum yang baik dan bersih mensyaratkan adanya pemilih yang mempunyai pengetahuan, kesadaran, bebas dari intimidasi berbagai pihak, dan terhindar dari pengaruh jaminan uang (*money politic*).

Dalam rangka ini proses pemilu perlu ditanggapi secara kritis oleh masyarakat, khususnya oleh pemilih dalam pemilu. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus melakukan upaya melalui regulasi serta bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat pemilih. Ketiadaan dukungan dari kalangan pemilih akan terasa cukup merugikan bagi target-target suara pemilu yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap parpol. Sehingga antusiasme dalam menciptakan budaya kritis dalam melihat fenomena sosial ekonomi politik menjadi rentan akan terpengaruhinya dengan kepentingan praktis oleh para parpol.

Penelitian ini menggunakan teori dari Perilaku Politik (Political Behavior) menurut Sitepu (2012:88) perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dan yang melakukan kegiatan politik tersebut adalah pemerintah dan masyarakat. Perilaku politik dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok yakni: pertama, perilaku politik lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah, kedua, perilaku politik warga negara biasa (baik sebagai individu maupun kelompok).

Suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan wewenang) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan (sedangkan fungsi itu sendiri merupakan upaya mencapai tujuan masyarakat, negara atau nilai-nilai politik), tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan dan dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu) individu yang membuat keputusan tersebut (Surbakti, 1992:131).

Faktor-faktor yang memengaruhi Perilaku Politik, diantaranya yaitu: 1). Perlu dipahami dalam konteks latar belakang historis. Sikap dan perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh proses-proses dan peristiwa historis masa lalu. Hal ini disebabkan budaya politik tidak merupakan kenyataan yang statis melainkan berubah dan berkembang sepanjang masa. 2). Faktor kondisi geografis memberikan pengaruh dalam perilaku politik masyarakat sebagai kawasan geostrategis, walaupun kemajemukan budaya Indonesia merupakan hal yang rawan bagi terciptanya disintegrasi. Kondisi ini mempengaruhi perbedaan tingkat partisipasi politik masyarakat,

kesenjangan pemerataan bangunan, kesenjangan informasi, komunikasi, teknologi mempengaruhi proses sosialisasi politik. dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman agama seseorang. 3). Pendidikan dan komunikasi juga mempengaruhi perilaku politik seseorang. Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin tinggi tingkat kesadaran politiknya. Komunikasi yang intens akan mempengaruhi perilaku politik seseorang dalam kegiatan politiknya. 4). Faktor kepribadian mempengaruhi perilaku politik.

Kajian terhadap perilaku politik lebih lanjut Sitepu (2012:89) menjelaskan bahwa dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis yaitu, individu sebagai aktor politik, agregasi politik dan tipologi kepribadian politik. Adapun di dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warganegara biasa. Perilaku Pemilih Perilaku adalah menyangkut sikap manusia yang akan bertindak sesuatu. Oleh karena itu sangat masuk akal tampaknya apabila sikap ini ditafsirkan dari bentuk perilaku. Dengan kata lain, untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu, kita dapat memperhatikan perilakunya, sebab perilaku merupakan salah satu indikator sikap individu (Bawono, 2008).

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadikan tujuan utama para kontestan untuk mereka mempengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Perilaku dalam hal ini dapat berupa komitmen maupun masyarakat pada umumnya. Konsisten adalah kelompok masyarakat yang merasa oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti politik dan seorang pemimpin (Firmanzah, 2007).

Perilaku pemilih juga sarat dengan ideology antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideology yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan pengelompokan antara ideologi yang dibawa kontestan.

Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi sama dibawa dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka (Nasution, 2009). Menurut Nursal (2004:54), ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih. Adapun pendekatan-pendekatan perilaku pemilih antara lain:

Berdasarkan perspektif sosiologis yang bersal dari Eropa dan di Amerika Serikat aliran pemikiran (*School of thought*) ini sangat populer di kalangan sosiologis dan ilmu politik yang berlatar belakang pemikiran Eropa. Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial usia, jenis

kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal, dan lainnya memberi pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih.

Seperti dalam hasil penelitian bahwa ada beberapa program yang diselenggarakan KPU kabupaten Tuban untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Seperti program sosialisasi politik untuk seluruh masyarakat, pendidikan politik untuk para pemilih pemula. Dan pembentukan relawan demokrasi untuk membantu mencapai tujuan dari KPU kabupaten Tuban.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan Psikologis Konsep psikologi sosial yang dipergunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk kepada persepsi pemilih atau partai-partai politik yang ada atau adanya korelasi atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai-partai politik tertentu. Konkritnya, partai-partai politik yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lainnya.

Pendekatan yang ketiga Pendekatan Rasional Alasan pilihan rasional berupa perhitungan untung rugi. Pendekatan ini melihat bahwa kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah tidak hanya ongkos memilih akan tetapi kemungkinan suaranya itu dapat memberikan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan dan juga sebagai alternatif berupa pilihan yang ada. Perhitungan untung dan rugi secara pribadi jikalau seseorang memilih sebuah partai politik tertentu.

Penelitian ini memfokuskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Tuban. Berdasarkan pendekatan Marketing Newman & Shet (1985) mengembangkan model perilaku pemilih berdasarkan beberapa domain yang terkait dengan marketing. Dalam penelitian yang dilakukan, KPU Kabupaten Tuban melakukan beberapa program yang sasarannya tepat. Ada program sosialisasi politik yang ditujukan pada masyarakat luas, dan ada juga program yang hanya ditujukan atau disasarkan pada pemilih pemula.

Faktor-faktor yang memengaruhi Perilaku Politik, diantaranya yaitu: 1). Perlu dipahami dalam konteks latar belakang historis. Sikap dan perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh proses-proses dan peristiwa historis masa lalu. Hal ini disebabkan budaya politik tidak merupakan kenyataan yang statis melainkan berubah dan berkembang sepanjang masa. 2). Faktor kondisi geografis memberikan pengaruh dalam perilaku politik masyarakat sebagai kawasan geostrategis, walaupun kemajemukan budaya Indonesia merupakan hal yang rawan bagi

terciptanya disintegrasi. Kondisi ini mempengaruhi perbedaan tingkat partisipasi politik masyarakat, kesenjangan pemerataan bangunan, kesenjangan informasi, komunikasi, teknologi mempengaruhi proses sosialisasi politik. dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman agama seseorang. 3). Pendidikan dan komunikasi juga mempengaruhi perilaku politik seseorang. Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin tinggi tingkat kesadaran politiknya. Komunikasi yang intens akan mempengaruhi perilaku politik seseorang dalam kegiatan politiknya. 4). Faktor kepribadian mempengaruhi perilaku politik.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dilihat kesimpulannya adalah bahwa upaya KPU kabupaten Tuban dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dengan cara pembuatan program sosialisasi politik, pendidikan politik bagi pemilih pemula serta pembentukan relawan demokrasi.

Pada sosialisasi politik upaya yang dilakukan oleh KPU kabupaten Tuban adalah menyelenggarakan kegiatan pengenalan dari partai politik dan pasangan calon dalam pesta demokrasi. Kegiatan tersebut juga didesain oleh pihak KPU dengan kreasi panggung seni dan pembagian doorprize agar dapat menarik antusias masyarakat Tuban.

Upaya yang dilakukan oleh KPU kabupaten Tuban adalah dengan menyelenggarakan program pendidikan politik bagi pemilih pemula. Serta upaya yang dilakukan lainnya adalah dengan membentuk relawan demokrasi. Upaya-upaya tersebut mampu meningkatkan partisipasi masyarakat Tuban dalam politik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban agar tetap melanjutkan dan menjalankan semua program-program kegiatan pra PEMILU. 2) Masyarakat (baik pemilih lanjut dan pemilih pemula) mendukung seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU kabupaten Tuban.

DAFTAR PUSTAKA

Alwisol. (2006). Psikologi kepribadian. Malang: UMM Press.

Asep, Ridwan. Memahami Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2004. Jurnal Demokrasi dan HAM Jakarta: The Habibie Center, 2000, hal. 25

Bawono, Muhammad. 2008. Persepsi dan Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk. Jurnal M'POWER No.8 Vol.8, Oktober 2008.

Budiardjo, Miriam. 2015. Dasar-Dasar Ilmu Politik cetakan 5. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Damsar. 2011. Pengantar Sosiologi Politik. Lampung. Kencana Prenada.

Efriza, 2012. Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik, Bandung. Alfabeta.

Gleko, Petrus. 2017. Strategi KPU Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 06 (01). ISSN. 2442-6962.

Goode, William J. 2007. Sosiologi Keluarga. Jakarta. Bumi Aksara.

Hyman, Herbert. 1959. Political Socialization. A Study in the Psychology of Political Behavior by Herbert H. Hyman. New York. Free Press.

Ihrom. 2004. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Kantaprawira, Rusadi. 2004. Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar. Bandung. Sinar Baru Algensindo.

Kurnia, Ferry. 2007. Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi : Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004. Jakarta. Idea Publishing.

Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Narwoko & Bagong, 2007. Jakarta. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Kencana.

Prihatmoko, Joko J. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Rohendi Rohidi, Tjetjep. 2009. Analisis data kualitatif. Jakarta. Universitas Indonesia.

Salusu. J. 2015. Pengambilan Keputusan Strategik: Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum No.15 Tahun 2011.

Sitepu, P. Anthonius. 2012. Teori-teori Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. 1998. Memahami Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Widya Sarana.